



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.764/2013

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2014 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.715/2013
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013;
2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/2938/B.PHI & JSTK/DTKT tanggal 19 November 2013 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2014;

3. Surat Walikota Balikpapan Nomor 561/0351/disnaker tanggal 15 November perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2014;
4. Berita Acara Kesepakatan tentang Penentuan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2014 tanggal 6 Nopember 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2014 sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.
- KEDUA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19620527 198503 1 006

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 November 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR.H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kota Balikpapan di Balikpapan;
5. Walikota Kota Balikpapan di Balikpapan;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan di Balikpapan;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Kota Balikpapan di Balikpapan;
10. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
11. Ketua DPD Kahutindo Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
13. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Kota Balikpapan di Balikpapan.